

TAJUK

Perubahan peta ekonomi di DIY tidak lagi sekadar rencana di atas kertas. Data realisasi investasi 2025 menunjukkan pergeseran nyata magnet baru pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan—Gunungkidul, Kulonprogo, dan Bantul.

Lonjakan investasi yang melampaui target menegaskan bagian selatan DIY bukan lagi wilayah pinggiran, melainkan pusat peluang baru.

Capaian tersebut tidak hadir secara tiba-tiba. Tersambungnya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) menjadi faktor kunci yang memutus isolasi wilayah

dan mempercepat arus barang, jasa, serta manusia. Konektivitas yang kian baik membuat kawasan selatan relevan secara ekonomi. Tidak hanya bagi sektor pariwisata, tetapi juga agribisnis, industri pengolahan, dan logistik. Infrastruktur akhirnya bertemu dengan kebutuhan pasar.

Oleh karenanya, tahun ini seharusnya menjadi momentum lanjutan, bukan titik berhenti. Potensi investasi yang telah tumbuh mesti dipertahankan dan didorong lebih besar. JJLS yang segera menghubungkan penuh tiga wilayah yang menamakan diri Kuntul Gunung

ini, semestinya menjadi daya tarik kuat bagi investor, terutama penanaman modal dalam negeri yang terbuka paling responsif membaca potensi lokal.

Di barat, Yogyakarta International Airport telah mengangkat Kulonprogo sebagai simpul konektivitas baru. Bantul dan Gunungkidul menawarkan ruang luas bagi pengembangan pangan, wisata bahari, serta ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Namun, tentu saja dukungan infrastruktur semata tidak cukup. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan daerah menangkap peluang secara

inovatif. Pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi kemudahan perizinan, memastikan kepastian tata ruang, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal. Tanpa langkah tersebut, investasi berisiko berhenti pada eksploitasi jangka pendek, bukan menciptakan nilai tambah pada daerah secara berkelanjutan.

Dokumen perencanaan jangka panjang DIY telah menempatkan kawasan selatan sebagai prioritas pertumbuhan dan gerbang wilayah. Kini yang dibutuhkan adalah keberanian implementasi. Ketimpangan lama antara kawasan utara—

Kota Jogja dan Sleman—dan wilayah selatan hanya dapat diperkecil jika investasi diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

Sudah saaatnya kawasan selatan benar-benar menjadi halaman depan Bumi Mataram. Bukan sekadar etalase proyek pembangunan. Ia semestinya menjadi wajah baru DIY yang lebih berimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Tahun Kuda ini harus menjadi fase konsolidasi dan lompatan baru agar lonjakan investasi hari ini menjelma fondasi ekonomi jangka panjang bagi Bumi Mataram.

## IHSG Jatuh, Pasar Menguji Kepercayaan



Eduardus Tandellin  
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan  
Bisnis Universitas Gadjah Mada

Baru-baru ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) Rabu, 28 Januari 2026 anjlok 659,67 poin (7,35%) ke 8.320,55. Tekanan jual yang merata sempat membuat penurunan melebar lebih dari 8% sehingga memicu *trading halt* (*circuit breaker*) di BEI.

Episode ini layak dibaca bukan semata sebagai “*panic selling*”, melainkan sebagai repricing atas risiko yang lebih struktural: kualitas transparansi dan pembentukan harga di pasar kita. Pemicu utamanya adalah hasil konsultasi MSCI tentang *free float* dan “*investability*” Indonesia.

MSCI menyoroti *opacity* dalam struktur kepemilikan dan kekhawatiran atas kemungkinan perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu *price formation*. MSCI lalu membekukan sejumlah penyesuaian indeks untuk saham Indonesia—termasuk menahan

penambahan saham dan migrasi naik antar-segmen—seraya memberi tenggat: bila perbaikan transparansi tidak memadai hingga Mei 2026, MSCI akan menilai ulang status aksesibilitas pasar Indonesia yang, setelah konsultasi lanjutan, dapat berujung pada pengurangan bobot di indeks emerging markets dan bahkan potensi reklasifikasi Indonesia menjadi *frontier market*.

Mengapa pasar langsung “meledak”? Karena MSCI adalah bahasa bersama investor global: indeksnya menjadi rujukan dana pasif (ETF/index fund) dan *benchmark* banyak manajer aktif. Ketika prospek *inflow* pasif dipertanyakan—atau skenario *downgrade* dibuka—pasar otomatis menghitungkan perlunya permintaan masa depan dan menaikkan premi risiko.

Pada saat yang sama, koreksi tajam sering dimulai dari saham paling likuid karena di situ lah efek dapat dilakukan cepat; efeknya merembet ke seluruh papan, bukan hanya emiten yang kebetulan terkait indeks. Di titik ini, masalahnya bukan sekadar “angka *free float*”, melainkan mesin pembentukan harga.

*Free float* yang tipis dan kepemilikan yang terkonsentrasi membuat volatilitas mudah membesar saat stres: *spread* melebar, antrean jual menumpuk, dan investor besar sulit keluar-masuk tanpa menggerakkan harga. Ketika data kepemilikan dinilai tidak



cukup transparan, kecurigaan investor tentang *fairness* market meningkat dan “*discount*” langsung ditempelkan ke seluruh pasar. Respons otoritas menjadi kunci untuk membalik persepsi. OJK, BEI, dan KSEI menyatakan akan membuka dialog dengan MSCI serta memperkuat transparansi data kepemilikan. BEI juga menegaskan langkah konkret: publikasi data *free float* secara komprehensif melalui kanal resmi sejak 2 Januari 2026 dan dilakukan rutin.

Ini arah yang tepat, namun pasar global akan menilai konsistensi implementasi, kejelasan klasifikasi pemegang saham, serta seberapa mudah data tersebut dipakai investor untuk menilai konsentrasi kepemilikan dan risiko likuiditas.

Di sisi lain, reformasi struktural

harus menjawab akar kerentanan: kedalaman pasar. *Reuters* melaporkan rencana regulator untuk menaikkan ketentuan minimum *free float* bertahap hingga 25% dari 7,5% saat ini demi memperbaiki likuiditas. Jika disusun dengan insentif yang benar roadmap yang jelas, transisi yang realistis, dan kebijakan yang mendorong emiten memperluas kepemilikan publik kenaikan *free float* dapat mengurangi volatilitas ekstrem.

Namun tanpa penegakan yang konsisten dan koordinasi yang rapi, reformasi mudah kehilangan kredibilitas di mata investor. Konteks global memperbesar sensitivitas. Dalam lingkungan suku bunga global yang masih tinggi, arus dana lintas negara lebih mudah berubah arah. Ditambah fragmentasi geopolitik dan perdagangan yang mendorong

investor semakin selektif, sinyal tata kelola dan kualitas data sering lebih menentukan daripada data makro bulanan. Pasar berkembang yang ingin menjaga “*porsi*” dalam portofolio global harus berlomba menawarkan kepastian—bukan hanya pertumbuhan.

Di dalam negeri, isu ini cepat menyentuh ranah politik-ekonomi: reputasi institusi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengevaluasi permintaan MSCI terkait transparansi data dan memantau pasar, termasuk menyiapkan pertemuan antar lembaga pasar keuangan.

Artinya, yang dipertaruhkan bukan hanya indeks hari ini, tetapi kredibilitas arsitektur pasar modal Indonesia di mata investor global—dan pada akhirnya biaya modal bagi emiten serta kemampuan pendanaan ekonomi riil.

Lalu bagaimana pelaku pasar menyikapinya? Bagi investor individual, disiplin adalah penyelamat. Hindari *leverage* saat volatilitas tinggi, bedakan portofolio investasi jangka panjang dari portofolio trading, dan jangan mengejar “*rebound*” tanpa rencana.

Jika memilih akumulasi, lakukan bertahap dan prioritaskan saham yang likuid, fundamentalnya solid, serta tata kelolanya jelas—karena isu yang dipersioalkan kali ini adalah kepercayaan, dan bukan sekadar valuasi murah. Bagi manajer investasi, ujian

utamanya adalah likuiditas dan komunikasi. Koreksi tajam berpotensi memicu redemption, sementara biaya transaksi naik. Perlu stress test skenario MSCI (pembekuan penyesuaian, penurunan bobot, hingga *downgrade*), penataan ulang *risk budget*, serta pengelolaan kas yang cukup.

Kepada pemegang unit, jelaskan apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan indikator pemulihan yang dipantau (misalnya langkah transparansi, pengawasan, dan penegakan). Bagi investor institusi, ini momen untuk menjadi penyeimbang sekaligus pengawal reformasi.

Mereka bisa melakukan rebalancing jangka panjang ketika valuasi turun, tetapi juga harus mendorong agenda *stewardship*: meminta transparansi kepemilikan yang lebih kuat, mendukung kenaikan *free float* yang realistis, dan menuntut penegakan atas praktik yang merusak price formation.

Akhirnya, kejatuhan IHSG kali ini adalah koreksi atas “*trust premium*” yang selama ini kita nikmati. Jika perbaikan transparansi dan penguatan institusi pasar bisa ditunjukkan secara terukur sebelum tenggat Mei 2026, volatilitas berpeluang mereda dan premi risiko turun. Jika tidak, “diskon kepercayaan” akan menetap lebih lama—dan biaya modal Indonesia ikut naik.

(JIBI/Bisnis Indonesia)



Apri Damai Sagita Krissandi  
Dosen PGSD Universitas Sanata Dharma

Masalah sistem honorer sering kali digeneralisasi sebagai potret seluruh profesi guru. Narasi ini telah mengaburkan pemahaman publik bahwa sebenarnya ada perbedaan nyata antara kondisi sebagian guru honorer dengan mayoritas guru guru profesional di Indonesia, termasuk guru PNS, guru PPPK, dan guru swasta di kota-kota besar, yang menjalani profesi ini dengan prospek ekonomi yang lebih kuat daripada yang sering didiskusikan di ruang publik.

Ketika realitas satu kelompok dijadikan wajah tunggal profesi, yang lahir bukan kritik yang mencerahkan, melainkan ketakutan kolektif yang tidak sepenuhnya

berlandaskan data. Padahal, data menunjukkan bahwa banyak pendidik memiliki penghasilan yang setara, bahkan dalam banyak kasus lebih stabil, dibandingkan dengan rata-rata pekerjaan lain di Indonesia.

Guru PNS dan PPPK berada dalam skema penggajian yang jelas dan diatur negara. Guru dengan kualifikasi S1 umumnya berada di golongan III dengan gaji pokok sekitar Rp2,8 juta hingga lebih dari Rp5 juta per bulan, dan dapat mencapai di atas Rp6 juta pada golongan IV tergantung masa kerja.

Angka ini belum termasuk tunjangan profesi guru bagi mereka yang telah bersertifikasi, yang besarnya setara satu kali gaji pokok. Dengan tambahan tunjangan daerah atau tunjangan kinerja di wilayah tertentu, penghasilan total guru ASN bersertifikasi secara realistis berada pada kisaran Rp6 juta–Rp8 juta per bulan, bahkan lebih.

Skema PPPK juga memperlihatkan arah kebijakan yang semakin menjanjikan. Guru PPPK menerima gaji pokok yang kompetitif, pada beberapa jenjang setara dengan PNS, disertai hak atas tunjangan profesi

setelah sertifikasi serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Secara struktural, profesi guru kini memiliki jalur karier dengan kepastian penghasilan dan keamanan kerja jangka panjang, sebuah keunggulan yang justru semakin langka di tengah dunia kerja yang penuh ketidakpastian.

Optimisme yang sama perlu diarahkan pada guru swasta, khususnya di kota-kota besar. Di Jakarta dan wilayah urban lain, data industri tenaga kerja menunjukkan bahwa gaji guru, baik negeri maupun swasta, umumnya berada pada kisaran jutaan rupiah dan di atas rata-rata nasional.

Estimasi dari platform data ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa gaji guru di Indonesia berada pada rentang sekitar Rp3,8 juta hingga Rp11 juta per bulan, dengan median sekitar Rp5,7 juta. Di sejumlah sekolah swasta unggulan dan sekolah internasional di Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya, angka ini bahkan dapat bersaing dengan profesi lain yang menuntut kualifikasi pendidikan setara.

Guru bahasa Inggris dan guru dengan kompetensi internasional memiliki peluang penghasilan yang lebih tinggi lagi.

Tentu, realitas guru honorer tetap harus diakui. Sebagian masih menerima penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan ada yang jauh di bawah standar hidup layak. Ini adalah persoalan serius yang membutuhkan pembenahan kebijakan ketenagakerjaan pendidikan. Namun, kondisi honorer tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai profesi guru secara keseluruhan.

### Mobilitas Ekonomi

Menggeneralisasi persoalan honorer justru menutup fakta bahwa profesi guru memiliki jalur mobilitas ekonomi yang nyata ketika sistem berjalan sebagaimana mestinya. Jika dibandingkan dengan profesi lain, guru tidak berbeda.

Hampir semua pekerjaan memulai karier dari penghasilan yang terbatas. Dokter muda masih magang, dosen pemula banyak yang honorer, insinyur lulusan baru pun sering menerima gaji di bawah harapan.

Kondisi ini adalah pola umum

dunia kerja, bukan tanda bahwa suatu profesi tidak layak. Justru pada profesi guru tersedia jalur peningkatan kesejahteraan yang jelas dan berjenjang, melalui sertifikasi, pengangkatan ASN atau PPPK, serta peluang karier di sekolah swasta dan internasional. Dalam jangka menengah hingga panjang, profesi guru menawarkan stabilitas penghasilan yang tidak dimiliki banyak pekerjaan lain.

Optimisme ini juga tercermin dari figur-figur guru inspiratif yang memulai jalan hidupnya dari ruang kelas, bukan dari privilege ekonomi. Salah satunya adalah Billy Mambasar. Ia tumbuh dari latar belakang sederhana di Papua dan memulai kiprahnya sebagai pendidik serta penggerak pendidikan di wilayah 3T.

Pengalaman mengajar dan mendampingi anak-anak Papua menjadi fondasi bagi langkah-langkah berikutnya dalam advokasi pendidikan, hingga akhirnya dipercaya memegang peran strategis di tingkat nasional. Perjalanan Billy menunjukkan bahwa profesi guru bukan jalan buntu, melainkan pintu masuk bagi kepemimpinan sosial dan kebijakan publik.

Kisah serupa juga banyak dijumpai pada guru-guru daerah yang berangkat dari ruang kelas, membangun inovasi pembelajaran, memimpin komunitas belajar, hingga diakui secara nasional. Mereka tidak memulai sebagai orang kaya, tetapi sebagai pendidik yang konsisten. Cerita-cerita ini menegaskan bahwa keberhasilan guru tidak diukur semata dari slip gaji, melainkan dari kombinasi antara keberlanjutan ekonomi, pengaruh sosial, dan ruang tumbuh profesional.

Karena itu, narasi yang terus menakuti generasi muda agar menajui profesi guru justru berpotensi menciptakan krisis regenerasi. Bukan karena profesinya tidak layak, tetapi karena persepsinya dibangun secara timpang. Guru tetap dan masih merupakan profesi yang menjanjikan stabilitas, keberlanjutan ekonomi, dan peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Tantangan memang ada, tetapi jawabannya bukan menjauh dari profesinya. Jawabannya adalah membenahi sistemnya, memperbaiki kebijakan, dan menjaga optimisme. Jangan takut menjadi guru. (\*\*\*)

Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab: Anton Wahyu Prihartono.  
Wakil Pemimpin Redaksi: Nugroho Nurcahyo.  
General Manager Content: Budi Cahyana.  
General Manager Content Strategist: Laila Rochmatin.  
Dewan Redaksi: Ahmad Djauhar, Rief Budisusilo.  
Y. Bayu Widagdo, Suwarnin, Rini Yustiansingih.  
Manajer Sekretariat Redaksi & Promosi: Putri Meridhita.  
Manajer Konten Senior: Maya Herawati, Sugeng Prayanto  
Manajer Konten: Arief Junianto, Bhekti Suryani, Galih Eko Kurniawan, Mediani Dyah Natalia, Yudhi Kusdiyanto.  
Reporter: Abdul Hamid Razak, Andreas Yuda Pramono, Anisatul Umah, Arik Fajar Hidayat, Catur Dwi Janati, David Kurniawan, Jumali, Khairul Ma'arif, Lukas Subatkar, Sirajul Khafid, Sunarto, Stefani Yulindriani Risa S. R, Ujang Hasanudin, Yosef Leon Pinsker.  
Videografer: Desi Suryanto (Koordinator).  
Asisten Manajer Kreatif & Desain: Muhammad Nurbawa Purna Yudha.

## Harian **Jogja**

BERBUDAYA. MENGINSPIRASI. TERPERCAYA.

Penerbit PT Aksara Dinamika Jogja

Sertifikat Dewan Pers No: 205/DP-Terverifikasi/K/II/2018

Presiden Direktur: Arief Budisusilo.  
Direktur Bisnis: Anton Wahyu Prihartono.  
Direktur Keuangan dan Administrasi: Annisa Nurul Aini.  
General Manager IMS: Sri Pujiningsih.  
Senior Manager Event Management: Eko Soetarmo.  
Manajer IMS: Della Ainun Nisa Yudha.  
Manajer Sirkulasi & Pengembangan Bisnis: Wisnu Wardana.

Alamat Redaksi/Perusahaan: Jl. A.M. Sangaji 41 Jogja–Telp: 0274-583183 (Hunting)–Faks: 0274-564440. [iklan@harianjogja.com](mailto:iklan@harianjogja.com) & [Sirkulasi@harianjogja.com](mailto:Sirkulasi@harianjogja.com)–  
Rekening Bank: PT Aksara Dinamika Jogja, Bank Mandiri cab. Katamaso 137-000.583963-3–Tarif Iklan: Display BW 20.500/mmkl, FC 33.000/mmkl, kolom 11.500/mmkl, baris 7.000/baris, dukacita BW 10.000/mmkl, FC 13.000/mmkl, hal 1 FC bawah lipatan Rp 80.000/mmkl, Atas lipatan Rp 85.000/mmkl, creative ad BW Rp 26.500/mmkl, FC 42.000/mmkl–Percetakan: PT Solo Grafika Utama. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Jurnal Harijan Jogja selalu dibekali tanda pengenalan dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apapun dari narasumber berkaitan dengan pemberian.

Redaksi menerima artikel dari penulis. Artikel diketik dengan spasi ganda maksimal 6.000 karakter disertai riwayat hidup singkat penulis, foto diri penulis, nomor rekening bank, dan NPWP (jika ada). Kirimkan melalui email ke [aspirasi@harianjogja.com](mailto:aspirasi@harianjogja.com). Artikel harus orisinal dan tidak dikirimkan ke media massa lain. Setiap artikel yang dibuat merupakan pendapat pribadi penulis, mencerahkan publik, dan tidak mempertentangkan SARA. Artikel yang diumut menjadi hak redaksi Harijan Jogja dan dapat diterbitkan di media lain yang terbagung dalam grup *Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI)*. Apabila lebih dari dua pekan tulisan tak diumut, penulis berhak mengirimi ke media lain. Sekretariat redaksi tidak melayani pembayaran honor secara langsung. Honor penulis akan dikirim melalui transfer bank.